



Penerapan Sila Ke-5 Keadilan Sosial Dalam Angka Putus Sekolah Terhadap Kurangnya Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bos Di Sd 064034 Medan

Najwatul Khoiriah, Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, Adamsyach Prana Walidin, Fauzan Azima, Khairul Fahmi Sagala

Universitas Negeri Medan

Abstract: Bersikap adil sebagaimana tercantum pada Pancasila sila ke-5 merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, banyak halangan yang ada dalam bersikap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diterapkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) pada dunia pendidikan Sekolah Dasar (SD) tepatnya pada SDN 064034 dan dampaknya pada angka putus sekolah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan wawancara untuk menggali bagaimana pendapat guru dan juga wali murid terhadap efektivitas penggunaan dana BOS pada SDN 064034. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dari para guru dan juga wali murid beserta angka putus sekolah pada SD tersebut guna memperoleh keterkaitan antar penyalahgunaan dana BOS dan juga angka putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD 064034 berlaku adil dalam penggunaan dana BOS dan memiliki angka putus sekolah yang kecil membuktikan bahwa nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia telah dijalankan dengan baik.

Keywords: Keadilan Sosial, Dana BOS, Angka Putus Sekolah, Transparansi

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2068>

Adamsyach Prana Walidin

Email: adamsyachpranawalidin@gmail.com

Received: 10-10-2024

Accepted: 11-11-2024

Published: 15-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Being fair, as outlined in the fifth principle of Pancasila, is a necessity in national and societal life. However, in reality, many obstacles hinder the practice of fairness. This study aims to analyze how the fifth principle of Pancasila, social justice for all Indonesian people, is applied in the use of the School Operational Assistance (BOS) funds in elementary education, specifically at SDN 064034, and its impact on dropout rates. This research uses a descriptive qualitative approach with observation and interview methods to explore teachers' and parents' perspectives on the effectiveness of BOS fund utilization at SDN 064034. Data collection techniques involved gathering interview results from teachers and parents, along with dropout statistics from the school, to examine the correlation between BOS fund mismanagement and dropout rates. The results of the study indicate that SDN 064034 demonstrates fairness in the use of BOS funds and has a low dropout rate, proving that the value of Social Justice for All Indonesian People has been effectively implemented.

Keywords: Social Justice, BOS fund, Dropout rate, Transparency

Pendahuluan

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan pedoman hidup bangsa, yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdiri dari lima sila, Pancasila mencerminkan identitas bangsa yang menjunjung persatuan, keadilan, dan toleransi dalam keberagaman. Setiap sila memiliki nilai moral: Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan religiusitas dan kebebasan beragama; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengutamakan hak asasi dan kesetaraan; Persatuan Indonesia menekankan persatuan dalam keragaman; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menekankan musyawarah sebagai prinsip demokrasi; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut pemerataan dan kesejahteraan. Namun, di era globalisasi, nilai-nilainya perlahan memudar. Sebagai sumber hukum utama, Pancasila harus menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Presiden BJ Habibie, dalam pidatonya pada 1 Juni 2011, menyebut dua penyebab utama lunturnya nilai Pancasila: perubahan kondisi bangsa dan trauma akibat penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini memicu "amnesia nasional," yaitu hilangnya kesadaran kolektif akan pentingnya Pancasila sebagai pilar utama bangsa. (Amalia & Dinie, 2021).

Prinsip keadilan, sesuai sila kelima Pancasila, menekankan kesejahteraan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Keadilan sosial mencakup empat aspek: keseimbangan untuk menciptakan kesetaraan ekonomi dan sosial, persamaan hak tanpa diskriminasi, penghargaan terhadap hak pribadi, dan keadilan Tuhan sebagai pedoman spiritual. Penerapan nilai-nilai ini bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur, di mana hak dan kewajiban berjalan seimbang, mendukung kehidupan berbangsa yang harmonis. (Resti, Dkk. 2024)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan, sesuai sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Program ini mengacu pada PP 18/2022 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai bagian dari 9 program Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik di bawah Kementerian Dalam Negeri. BOS disalurkan dengan asas kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas tanpa diskriminasi. Namun, kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana BOS masih terjadi, didorong oleh tekanan situasional, kesempatan, dan rendahnya integritas. Faktor penyebabnya meliputi tingginya anggaran pendidikan yang membuka peluang korupsi, lemahnya integritas oknum pendanaan pendidikan, dan kurang optimalnya pengawasan masyarakat. Program BOS tetap penting untuk mendukung pendidikan yang merata dan berkualitas. (Susilawati, Dkk. 2024)

Biaya Operasional Sekolah (BOS) tidak sepenuhnya menanggung biaya sekolah, melainkan bersifat pendamping dana dari pemerintah daerah. Efektivitas program BOS bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. Konflik terkait penyalahgunaan dana BOS oleh komite sekolah menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum lebih ketat. Selain itu, dana BOS sering dianggap kurang tepat sasaran dan tidak proporsional dengan jumlah siswa. (Zainuddin, 2019)

Mengatasi korupsi memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional. Langkah pencegahan meliputi transparansi, penguatan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pendidikan antikorupsi bertujuan

meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi, mempromosikan budaya integritas, dan membekali individu dengan pengetahuan untuk melawan korupsi. Program ini meliputi penyuluhan, pelatihan, kurikulum, dan pengembangan kapasitas sejak pendidikan dasar hingga tinggi. Pendidikan antikorupsi melibatkan guru, siswa, orang tua, dan komunitas untuk membentuk nilai, sikap, serta kemampuan kritis dalam menilai situasi korupsi. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran akan dampak sosial, ekonomi, dan politik korupsi serta pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. (Farid, et al. 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Arum Cahyaningtyas, Bagus Dionyzar H. Akbar, dan Cahya D. Lestari mengkaji peran dana BOS dalam mendukung siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. Menggunakan metode Difference in Difference (DiD), penelitian ini menemukan bahwa dana BOS memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap angka putus sekolah, artinya program ini berhasil menurunkan tingkat putus sekolah secara efektif. Namun, penyalahgunaan dana BOS dapat mengurangi manfaat tersebut. Ketika dana tidak digunakan sesuai tujuan utama, misalnya dialihkan untuk kebutuhan administratif atau kegiatan lain yang tidak relevan dengan pembelajaran, dampaknya dalam mencegah putus sekolah menjadi tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS masih menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah di beberapa daerah, meskipun program ini secara prinsip dirancang untuk membantu pemerataan akses pendidikan. (Arum, dkk, 2022)

Metodologi

Menurut Haryono Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dapat berupa perilaku, perspektif, tindakan, motivasi dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam kata-kata, tulisan, Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Haryono, 2023). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan tema menganalisis keterkaitan antar angka putus sekolah dengan penyalahgunaan dana BOS yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap teknik memiliki peran penting dalam mendapatkan data yang akurat dan mendalam. Penelitian berlokasi pada SDN 064034 dengan NPSN 10209806 yang beralamat di jalan STM Ujung/Suka Luhur No. 13 di desa Suka maju kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah 2 orang wali kelas SDN 064034 dan 3 orang wali murid SDN 064034. Pemilihan subjek ini didasari oleh keterkaitan yang ada dikarenakan pihak wali kelas dan wali murid merupakan yang terdekat pada murid itu sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik responden adalah sebuah Gambaran atau deskripsi singkat tentang seseorang atau organisasi dari objek penelitian yang mana dapat memberikan jawaban atau hasil penelitian dari tanggapan mengenai pertanyaan pertanyaan yang diberikan. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapat informasi mengenai topik terkait.

Table 1: Identitas Responden Wawancara terkait Dana BOS

Nama Responden	Jenis Kelamin	Posisi
Wardiyah Jaman Martondang	Perempuan	Guru
Laila Armaya	Perempuan	Guru
Suprianto	Laki Laki	Orang tua murid
Asthi Fuso Siregar	Perempuan	Orang tua murid
Rahmayani Putri Ananda	Perempuan	Orang tua murid

Pada wawancara tersebut, diajukan pertanyaan yang relevan terhadap identifikasi pengelolaan dana BOS pada SDN 064034 sesuai dengan sila ke-5 tentang keadilan sosial. Pertanyaan tersebut sebagai berikut:

- Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap hubungan antara Pancasila terhadap pendidikan bangsa?
- Menurut ibu/bapak, apa contoh sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diterapkan dalam lingkungan pendidikan?
- Saya ingin bertanya perihal dana bantuan operasi sekolah atau bos, apakah dana ini merupakan salah satu penerapan keadilan menurut sila ke 5?
- Menurut ibu/bapak, apakah ada relevansi antara dana bos dengan angka putus sekolah? (Jika ada, minta pendapat untuk dijelaskan)
- Kira kira untuk mencapai pendidikan berkualitas, apakah suasana serta sarana Prasarana sekolah berpengaruh?

Jawaban yang didapat saat wawancara bervariasi oleh masing masing guru dan orang tua murid, namun tetap sampai pada satu jawaban yang sama, yaitu dana BOS memainkan posisi yang penting dalam pelaksanaan pendidikan dan tidak berdampak tinggi pada peningkatan angka putus sekolah, setidaknya pada SDN 064034. Berikut merupakan rincian atas jawaban dari pertanyaan diatas:

- **Pertanyaan Pertama:**

Setiap guru sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan secara menyeluruh sebagai landasan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. **Ibu Wardiyah** menekankan pentingnya ideologi sebagai kiblat pendidikan. **Ibu Laila** menyatakan pendidikan harus berpedoman pada dasar ideologi bangsa. **Bapak Suprianto** menyebut kelima sila sebagai dasar penting bagi siswa. **Ibu Asthi** mengaitkan nilai Pancasila dengan pengaturan moral anak. **Ibu Rahmayani** menyoroti pentingnya konsistensi penerapan Pancasila dalam membimbing perilaku siswa.

- **Pertanyaan Kedua:**

Keadilan dalam pendidikan tercermin dari berbagai aktivitas. **Ibu Wardiyah** mencontohkan pembagian tugas piket yang adil serta penggunaan Dana BOS untuk mewujudkan keadilan. **Ibu Laila** menekankan pentingnya menjadi penengah dalam rivalitas siswa. **Bapak Suprianto** menyebut bahwa bangunan sekolah pun dibangun dari Dana BOS. **Ibu Asthi** menyoroti penggunaan Dana BOS untuk menggantikan uang buku dan kegiatan siswa. **Ibu Rahmayani** mengaitkan keadilan dengan pemenuhan waktu belajar dan istirahat siswa.

- **Pertanyaan Ketiga:**

Dana BOS dinilai sangat penting sebagai bentuk keadilan pemerintah. **Ibu Wardiyah** menganggapnya sebagai "senjata" untuk mendukung pendidikan, meski terkadang tidak optimal. **Ibu Laila** menyebutnya sebagai upaya memajukan pendidikan meski tak selalu menjamin keberhasilan. **Bapak Suprianto** melihat Dana BOS sebagai bentuk keadilan dalam pendidikan. **Ibu Asthi** menyatakan bahwa Dana BOS membantu siswa yang membutuhkan. **Ibu Rahmayani** menyebut Dana BOS sebagai usaha nyata pemerintah dalam mendukung pendidikan.

- **Pertanyaan Keempat:**

Pengaruh Dana BOS terhadap keberlanjutan pendidikan bervariasi. **Ibu Wardiyah** menyebut bahwa pengelolaan yang tidak optimal bisa memengaruhi keberlanjutan sekolah. **Ibu Laila** melihat bahwa di SD tempatnya mengajar, belum ada murid yang putus sekolah karena kurang mampu. **Bapak Suprianto** mengaku kurang mengetahui dampak besar Dana BOS pada keberlanjutan sekolah. **Ibu Asthi** memberikan contoh pribadi bagaimana Dana BOS membantu administrasi pendidikan untuk anak asuhnya. **Ibu Rahmayani** menambahkan bahwa di daerah tertentu, alokasi transportasi dari Dana BOS mendukung keberlanjutan pendidikan siswa.

- **Pertanyaan Kelima:**

Dana BOS sangat berpengaruh pada kesejahteraan guru dan siswa. **Ibu Wardiyah** menyoroti pentingnya fasilitas seperti Wi-Fi yang cukup untuk kegiatan belajar. **Ibu Laila** menyebutkan Dana BOS menopang kompetisi siswa di berbagai lomba. **Bapak Suprianto** mempertanyakan relevansi sekolah negeri tanpa Dana BOS. **Ibu Asthi** mengingatkan bahwa fasilitas yang buruk, seperti atap bocor, memengaruhi efektivitas belajar. **Ibu Rahmayani** menekankan Dana BOS sebagai penopang lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pembelajaran.

Korelasi Penyalahgunaan dana BOS Terhadap Angka Putus Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung pembiayaan pendidikan, khususnya di jenjang sekolah dasar dan menengah. Tujuannya adalah memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua anak tanpa terkendala oleh biaya. Namun, ketika dana ini disalahgunakan, dampaknya

dapat signifikan terhadap angka putus sekolah. Berikut adalah korelasi yang dapat diidentifikasi dari penelitian kami:

1. Minimnya Fasilitas Penunjang Pendidikan, Penyalahgunaan dana BOS dapat mengakibatkan fasilitas belajar seperti buku, alat tulis, dan infrastruktur sekolah tidak tersedia atau tidak memadai. Kondisi ini membuat proses belajar mengajar tidak optimal, sehingga menurunkan motivasi siswa untuk tetap bersekolah.
2. Kendala Ekonomi Siswa, Dana BOS sering digunakan untuk meringankan biaya operasional siswa, seperti pembebasan biaya buku atau seragam. Jika dana ini tidak dikelola dengan baik, siswa dari keluarga kurang mampu tetap terbebani biaya tambahan, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka keluar dari sekolah.
3. Ketidakadilan dalam Distribusi dan Penggunaan Dana, Penyalahgunaan BOS sering kali menciptakan ketidakadilan, di mana anggaran tidak digunakan untuk kebutuhan prioritas sekolah. Misalnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk beasiswa siswa kurang mampu justru dialihkan ke kebutuhan yang tidak relevan. Hal ini memperparah ketimpangan ekonomi di lingkungan sekolah.
4. Menurunnya Kesejahteraan Guru, Penyalahgunaan dana BOS juga bisa berdampak pada kesejahteraan guru, terutama yang terkait dengan tunjangan atau pelatihan. Guru yang tidak mendapatkan dukungan optimal cenderung kurang termotivasi, yang berimbas pada kualitas pengajaran dan kenyamanan siswa di sekolah.
5. Menurunnya Kepercayaan Orang Tua, Ketika penyalahgunaan dana BOS terungkap, kepercayaan orang tua terhadap sekolah menurun. Mereka mungkin enggan menyekolahkan anak-anak mereka karena merasa tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana, terutama jika mereka harus tetap mengeluarkan biaya tambahan yang tidak semestinya.
6. Dampak Sistemik pada Pendidikan Lokal, Penyalahgunaan dana BOS juga dapat merusak sistem pendidikan di daerah. Ketika kualitas pendidikan memburuk, siswa menjadi lebih rentan untuk berhenti sekolah, yang akhirnya berkontribusi pada meningkatnya angka putus sekolah secara keseluruhan.

Dengan demikian, pengelolaan dana BOS yang buruk dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan angka putus sekolah. Oleh karena itu, pengawasan dan transparansi dalam penggunaannya sangat penting untuk memastikan program ini benar-benar mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak.

Kesimpulan

Kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian pada SDN 064034, adalah penggunaan dana BOS di sekolah tersebut sudah sesuai. Menurut pendapat dari para wali murid, mereka merasakan adanya dampak dari penggunaan dana BOS seperti pembayaran buku dan keikutsertaan studi tour. Hal ini dikonfirmasi kembali oleh para responden dari wali kelas yang mengatakan bahwa alokasi dana BOS telah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, adanya penggunaan dana bos yang sesuai ini menjadikan lingkungan sekolah yang mendukung, ekstrakurikuler yang lancer dan sarana serta prasarana yang lengkap. Menurut kesaksian guru, tidak ada yang pernah dropout karena ekonomi menunjukkan bahwa pengalokasian dana BOS yang baik dapat memberi

keberlanjutan pendidikan pada siswa yang membuat angka putus sekolah tidak semakin naik dan bertambah.

Saran yang bisa diberikan untuk para mahasiswa adalah, penting untuk menghargai guru yang telah banyak berkorban bahkan terkadang rela mengeluarkan uang pribadi demi anak didiknya serta saran yang bisa kami berikan untuk kementerian pendidikan dan sebagainya adalah, Penting untuk meninggikan kesejahteraan guru dan menjamin keselamatan tenaga pengajar baik guru ataupun dosen, melindungi ekosistem pendidikan, serta memajukan aspek aspek pendidikan yang ada.

Daftar Pustaka

- Agustiawan, Melati, R. and Rodiah, S. (2022) 'Pengaruh Budaya Organisasi, proactive fraud audit, whistleblowing, Dan Pengendalian internal TERHADAP Pencegahan Kecurangan Dalam pengelolaan Dana Bos', *Accounting and Management* doi:10.33086/amj.v6i1.2378. *Journal*, 6(1), pp. 17–25.
- Cahyaningtyas, A., Akbar, H.D.B, Lestari, D.C. (2022) Dampak Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Putus Sekolah di Indonesia. *HERO: Himie Economics Research And Olympiad*. 1(1), pp. 116-122.
- Elvira, E. (2021) 'Birokrasi Dan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) Pada Pemerintahan Daerah kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Pada tahun 2013-2015', *iqra: Jurnal ilmu kependidikan dan keislaman*, doi:10.56338/iqra.v16i1.1588. 16(1), pp. 22–27.
- Mauludi, D.R. (2023) 'Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Bos Oleh Tenaga Kependidikan di Lingkungan sekolah berdasarkan Perspektif Kriminologi', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1), pp. 119–143. doi:10.24252/ad.vi.38157.
- Nursya (2020) BEBERAPA BENTUK PERBUATAN PELAKU BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI. Jakarta: Alungadan Mandiri.
- Putra, R.A. and Wahjoeno, D. (2024) 'PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA', *KULTURA: Jurnal ilmu sosial dan humaniora*, 2(5), pp. doi:https://doi.org/10.572349/kultura.v2i5.1404. 160–169.
- Putri, S.T. and Panjaitan, B.S. (2023) 'Pertanggungjawaban Kepala Sekolah Terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos ', *UNES Law Review*, 6(2), pp. 7036 7046. doi:10.31933/unesrev.v6i2.
- Sumaryati, Suyadi and Hastuti, D. (2019) PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Yogyakarta: UAD Press.

-
- Susilawati, N. P. P., Saravistha, D. B. ., & Aristiawan , I. G. N. . (2024). Penegakan Hukum Kasus Korupsi Dana Bos dan Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan 38 Hukum*, 2(1), 42–49. Retrieved from <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/759>
- Ta'dung, Y.L. et al. (2022) 'Analisis efektivitas Pengelolaan Dana bantuan operasional Sekolah (Dana Bos) pada SMA Katolik Rantepao, Toraja Utara', *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), pp. 167 175. doi:10.55606/cemerlang.v2i2.327.
- Wajdi, F. (2024) Pengantar Pendidikan Anti-Korupsi. Bandung, Jawa Barat: Penerbit Widina. Zainudin, Moh. (2021) 'Penyelewengan Dana Bos dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi pihak sekolah terhadap publik', *Jurnal Jendela Hukum*, 6(2), pp. 32–38. doi:10.24929/fh.v6i2.1558.